

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (*Good Corporate Governance*)

Tahun 2024

PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera



PENJELASAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha yang diiringi dengan meningkatnya risiko bisnis tentu menjadi tantangan yang dihadapi oleh industri jasa keuangan, khususnya perbankan dalam menerapkan tata kelola yang baik. Kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya yang kuat dalam menunjang keberlanjutan usaha dalam upaya mencapai tujuan bisnis perusahaan.

Sesuai dengan visi perusahaan untuk “menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat” maka dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera (BDS) memiliki komitmen yang tinggi dalam menerapkan tata Kelola yang baik dan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten untuk memperkuat daya saing usaha dalam rangka memelihara kepercayaan yang selama ini telah diberikan oleh masyarakat maupun pemegang saham.

Regulator juga telah menetapkan penerapan tata kelola bagi BPR Syariah pada POJK No. 24/POJK.03/2018 yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 dan No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana Bank wajib untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh aspek atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Diantaranya, BPR Syariah BDS melakukan penilaian sendiri (*self assesement*) dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG.

B. PRINSIP TATA KELOLA

BPR Syariah BDS dalam mengelola perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jajaran organisasi.

1. Keterbukaan, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR Syariah sehingga pengelolaan berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan BPR Syariah dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR Syariah yang sehat;
4. Independensi, pengelolaan BPR Syariah secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dan segala bentuk kepentingan (*conflict of interest*) dari pihak manapun;
5. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.

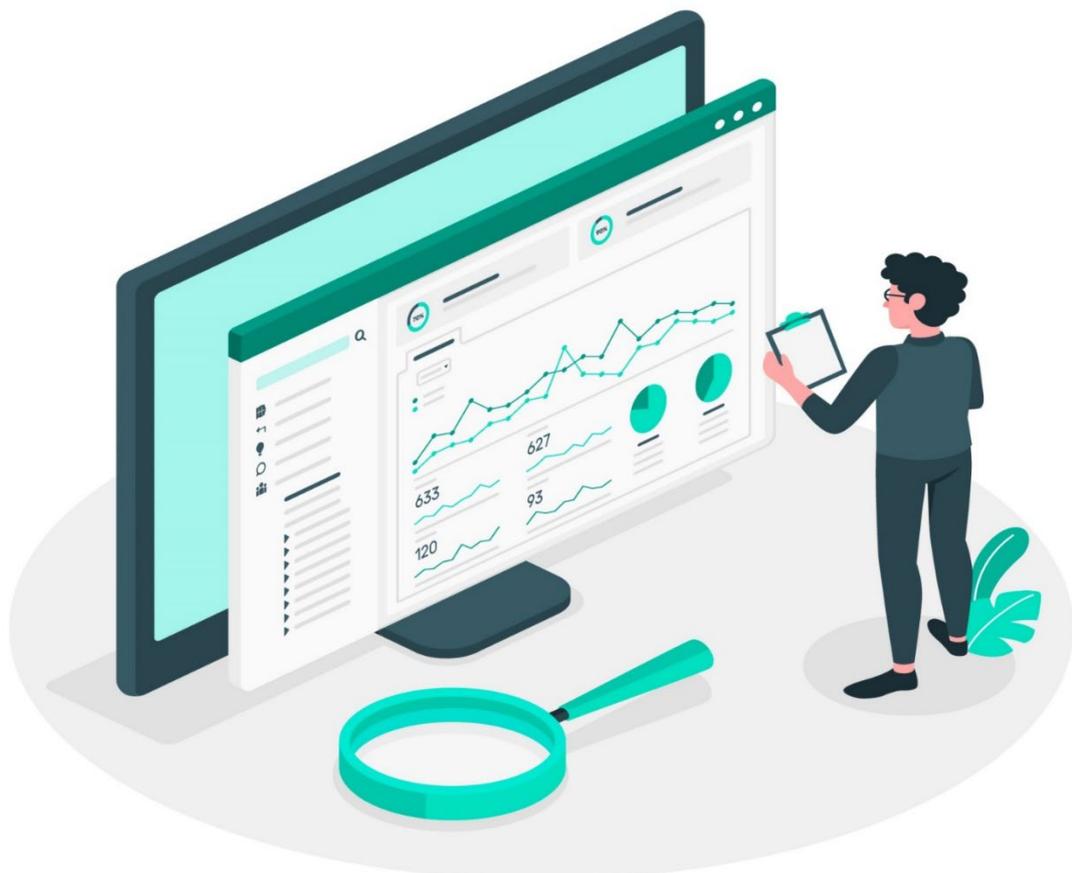
Selain itu, sebagai lembaga perbankan syariah, BPR Syariah BDS berpegang teguh dan konsisten menjalankan prinsip syariah, yang pada setiap aktivitas operasionalnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. REFERENSI REGULASI

BPR Syariah BDS telah melaksanakan tata kelola perusahaan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, ketentuan regulator maupun internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan tata kelola perusahaan BPR Syariah BDS:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. POJK No. 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
5. POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS;
6. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Manajemen Risiko Bagi BPRS;
7. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
8. POJK No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
9. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
10. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Perekonomian Rakyat Syariah;
11. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
12. POJK No. 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
13. POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

14. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
15. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
16. SEOJK No. 11/ SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
17. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
18. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



PENERAPAN TATA KELOLA

A. CAKUPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nama	Edi Sunarto	Budi Nugroho
Jabatan	Direktur Utama	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan tata kelola sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- b. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPR Syariah dengan menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPR Syariah, pedoman dan tata tertib kerja Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- c. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR Syariah, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi Kepatuhan;
- e. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
- f. Direksi kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- g. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada perjanjian yang jelas, dan konsultan merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
- h. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dengan mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat;
- i. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPR Syariah mengikat dan menjadi tanggungjawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPR Syariah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan telah membuat risalah rapat Direksi yang didokumentasikan dengan baik.

Direksi juga telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Nama	Suranto	Wildan Zia Muhammad Dani
Jabatan	Komisaris Utama	Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik;
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik, terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS;
- e. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak

- terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah;
 - g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat;
 - i. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
 - j. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Mendorong Direksi untuk mengembangkan sistem informasi yang akan diaplikasikan pada Bank, termasuk kerjasama dengan *fintech* yang legal sesuai dengan ketentuan yang ada;
- b. Kebutuhan Dewan Pengawas Syariah akan staf khusus dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan;
- c. Mengoptimalkan kemanfaatan dari fasilitas gedung baru Kantor Pusat;
- d. Mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tabungan agar komposisinya menjadi lebih besar dari pada DPK Deposito;
- e. Meminta kepada Direksi untuk berhati-hati dalam proses penyaluran dana dengan maraknya kasus korban pinjaman *online* dan judi *online*;
- f. Meminta kepada Direksi agar rasio penyaluran dana yang bermasalah dapat sesuai target.

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Tulus Musthofa	Ahim Abdurahim
Jabatan	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik
- b. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional –MUI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPR Syariah;
- f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah;
- g. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPR Syariah untuk pelaksanaan tugasnya;
- h. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
- j. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (Empat) kali disertai dengan membuat risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Kepada Direksi

- a. Dewan Pengawas Syariah membutuhkan staf khusus yang dapat membantu tugas Dewan Pengawas Syariah;
- b. Mendorong kepada Direksi untuk senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, terutama dalam proses penyaluran dana.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semeseter I

Nomor	Tanggal
77/BDS/S-PNG/VIII/2024	30 Agustus 2024

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semeseter II

Nomor	Tanggal
/BDS/S-PNG/II/2025	31 Januari 2024

4. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Keterangan	Komite		
	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi
Tugas dan Tanggung Jawab	-	-	-
Program Kerja	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Jumlah Rapat	-	-	-

Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominal	
-	-	-	-	-	-

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR Syariah	PT BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera
Tahun	2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,5	1

Analisis

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum Sangat Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen BPR Syariah.

Analisis

1. *Governance Structure*

- a. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BPR Syariah BDS telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus *fit and proper test*);
- b. Telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko;

- d. Telah memiliki kebijakan dan prosedur kegiatan usaha BPR Syariah dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Pedoman Kebijakan Pembiayaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan lainnya;
 - e. Perlu pembenahan struktur Sumber Daya Insani (SDI) supaya tidak terjadi over load pekerjaan.
2. *Governance Process*
- a. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik;
 - b. BPR Syariah telah menindaklanjuti temuan audit, baik temuan Audit Eksternal maupun Audit Internal;
 - c. Perlu peningkatan pengendalian internal seperti proses *dual control*, supervisi dan *risk awareness*/penciptaan budaya peduli risiko, sehingga masih terdapat temuan-temuan audit yang berisiko tinggi;
 - d. Perlu peningkatan dalam proses pendidikan, pelatihan sehingga pemahaman terhadap ketentuan dapat memadai.
3. *Governance Outcome*
- a. BPR Syariah telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan dan non keuangan serta informasi produk sesuai dengan ketentuan;
 - b. Secara umum pencapaian RBB tahun 2024 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan;
 - c. Ketepatan penyampaian pelaporan kepada regulator harus terus terus ditingkatkan;
 - d. Perlu peningkatan prinsip kehati-hatian terhadap pelanggaran/pelampauan BMPD;

- e. Perlu peningkatan penerapan prinsip syariah terutama pada proses penyaluran dana.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
	Bank Bersangkutan		Perusahaan Lain	
	Rp	%	Nama	%
Edi Sunarto	0	0	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	0,3
Budi Nugroho	0	0	0	0

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Edi Sunarto	Nihil	Nihil	Nihil

Budi Nugroho	Nihil	Nihil	Nihil
--------------	-------	-------	-------

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Edi Sunarto	Nihil	Nihil	Nihil
Budi Nugroho	Nihil	Nihil	Nihil

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	Bank Bersangkutan		Perusahaan Lain	
	Rp	%	Nama	%
Suranto	1.690.000.000	13	PT Barokah Mulia Wisata	20
Wildan Zia Muhammad Dani	390.000.000	3	Nihil	0

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Suranto	Nihil	Nihil	Nihil
Wildan Zia Muhammad Dani	Nihil	Nihil	Nihil

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Suranto	Nihil	Nihil	Nihil
Wildan Zia Muhammad Dani	Nihil	Nihil	Noor Liesnani Pamella (Ibu Kandung)

G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA PERUSAHAAN LAIN

Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPR Syariah Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
Suranto	Nihil	Nihil
Wildan Zia Muhammad Dani	CV. Amarilis Tunas Bahagia	Direktur
	CV. Tamarind Berkah Abadi	Direktur

H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama BPR Syariah Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
Tulus Mustofa	Nihil	Nihil
Ahim Abdurahim	PT. BPR Syariah HIK MCI	Ketua Dewan Pengawas Syariah

I. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi	
	Orang	Rp
Remunerasi		
Gaji Pokok	2	667.680.000
Tunjangan	2	114.826.567
Tantiem	2	46.580.000
Bonus	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	24.000.000
Total	2	853.086.567
Fasilitas Lain		
Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	17.491.752
Lainnya	2	0
Total	2	17.491.752
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	870.578.319

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Dewan Komisaris	
	Orang	Rp
Remunerasi		
Gaji Pokok	2	259.200.000
Tunjangan	2	8.479.872
Tantiem	2	19.305.000
Bonus	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	286.884.872
Fasilitas Lain		
Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	278.404.872

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp
Remunerasi		
Gaji Pokok	2	129.600.000
Tunjangan	2	0
Tantiem	2	9.266.400
Bonus	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	138.866.400
Fasilitas Lain		
Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	138.866.400

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah terendah	1,25
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	4,65
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0,38
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	2,83

K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal	Peserta	Agenda
1	29-02-2024	2	Performa 2 bulan terakhir, terutama Funding, Lending, dan NPF

			<p>Mempertimbangkan usulan strategi baru yang diterapkan dalam rangka terjadinya pergeseran selera masyarakat khususnya di dunia perbankan</p> <p>Persiapan RUPS</p>
2	24-04-2024	2	<p>Sistem informasi yang akan diaplikasikan di BDS terus di dorong kepada Direksi, termasuk kerjasama dengan fintech yang legal sesuai ketentuan yang ada</p> <p>Kebutuhan DPS terkait staf administrasi, hal tersebut akan disampaikan kepada Direksi untuk dipertimbangkan</p> <p>Perkembangan bisnis di quarter I tahun 2024</p>
3	31-08-2024	2	<p>Rencana pengadaan mesin genset dan pagar. Untuk lantai 4 sebagai lapangan olahraga diperlukan peredam suara, soundsystem, meja dan kursi</p> <p>APU-PPT, TI dan Audit TI, Mobile Banking</p> <p>Perubahan POJK terkait TKS dan Nomenklatur BPR Syariah</p>

			Rencana RUPS di September
4	01-10-2024	2	Laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi, proyeksi laba dan NPF tahun 2024
			Peningkatan nilai AYDA dibanding bulan sebelumnya
			Optimalisasi pemanfaatan gedung baru
			APU-PPT, Pengawasan terhadap transaksi dengan nilai tertentu yang perlu diawasi sesuai ketentuan yang ada
			Ketentuan baru CKPN
			Perkembangan TI yang telah dan akan dilakukan
5	30-12-2024	2	RBB 2025 seperti perbandingan DPK Tabungan dan Deposito, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan DPK Tabungan menjadi lebih besar daripada Deposito
			Mengkonfirmasi kembali target laba yang telah ditetapkan realistis untuk dicapai

			Perkembangan TI yang akan dilakukan
			Meminta kepada direksi untuk berhati-hati dalam proses pembiayaan dengan maraknya kasus korban pinjol, dan judol
			Berharap target NPF dapat sesuai rencana
6	31-12-2024	2	Performa akhir 2024
			Finalisasi RBB 2025

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
	Fisik	Telekonfrensi	
Suranto	6	0	100
Wildan Zia Muhammad Dani	6	0	100

L. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal	Peserta	Agenda
1	25-01-2024	4	Laporan Pemeriksaan DPS Semester II 2023
2	24-04-2024	4	Simpanan Deposito dari BKK Secara Langsung dan Via <i>Fintech</i>
			Pemberlakuan Nisbah Spesial
			Penunjukan Staf Khusus yang Membantu Administratif DPS
3	30-08-2024	5	Penempatan Pada Bank Konvensional
			Dana yang Tidak Diketahui Sumbernya
			<i>Wakalah al Ijarah</i>
4	19-12-2024	4	Penetapan Tugas dan Fungsi Staf yang Membantu Tugas DPS

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
	Fisik	Telekonferensi	
Tulus Musthofa	4	0	100

Ahim Abdurahim	4	0	100
----------------	---	---	-----

M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan			
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris	
	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan			
	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	0	0	0	0

Telah Diselesaikan	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0

N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	2	0

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0	0	Nihil

P. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Tanggal	Kegiatan	Deskripsi	Penerima Dana	Nominal (Rp)
26-07-2024	Sosial	Khitanan Masal	Pondok Ulul Albab	400.000
29-07-2024	Sosial	Senam Sehat	Harkop Bantul	500.000
29-07-2024	Sosial	Kafilah Seleksi	Harkop Bantul	500.000
06-08-2024	Sosial	Timbangan Digital	Kelurahan Brontokusuman	17.000.000
21-08-2024	Sosial	Pendidikan Kader	Masjid Syuhada	500.000
21-08-2024	Sosial	Hari Santri Tartil Al-Qur'an	Masjid Syuhada	1.000.000

02-09-2024	Sosial	Wisuda Santri	TPQ Muhammadiyah Sunan	200.000
10-09-2024	Sosial	Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Santri	TPQ Muhammadiyah Sunan	200.000
25-09-2024	Sosial	Air Bersih	Dompot Dhuafa	1.000.000
02-10-2024	Sosial	Donatur	Syuhada Ceria	250.000
02-10-2024	Sosial	Ambulan Amal	Syuhada	500.000
03-10-2024	Sosial	Air Bersih	Pedukuhan Tunggu Gunungkidul	300.000
04-10-2024	Sosial	Pengajian Akbar	Masjid Al-Bahrawi	500.000
15-10-2024	Sosial	Kesehatan Gratis	Laznas Bias	1.000.000
15-10-2024	Sosial	Renovasi Masjid	Masjid Al-Bahrawi	500.000
16-10-2024	Sosial	Donatur Beras	BMT Bringharjo	250.000

16-10-2024	Sosial	Donatur Beras	Sahabat Qur'an Nusantara	500.000
23-10-2024	Sosial	Hari Santri	Kecamatan Danurejan	300.000
24-10-2024	Sosial	Sembako Gratis	Masyarakat Umum	30.000.000
05-11-2024	Sosial	Donor Darah	Masyarakat Umum	3.550.000
19-11-2024	Sosial	Bakti Sosial	PA Ghifari Girike	1.000.000
20-11-2024	Sosial	Bakti Sosial	Lembaga Pendidikan Aum Mergangsan	1.000.000
22-11-2024	Sosial	Bakti Sosial	Becak Pariwisata Keben Kulon	200.000
25-11-2024	Sosial	Mesin Pencacah Sampah	Kecamatan Mergangsan	200.000
25-11-2024	Sosial	Donor Darah	Masyarakat Umum	2.500.000
17-12-2024	Sosial	Gerakan Sayang Ibu	Masyarakat Patangpuluhan	250.000

19-12-2024	Sosial	Pembangunan Gapura	Dusun Sebrang	250.000
19-12-2024	Sosial	Bencana Alam Nasional	BMT Huara	1.000.000
10-07-2024	Sosial	Yatim Piatu	Masjid Nurul Jannah	1.000.000
16-07-2024	Sosial	Pembangunan Masjid	PP Al Maghfiroh	1.000.000
16-07-2024	Sosial	Pembangunan Masjid	PP Al Maghfiroh	1.000.000
28-09-2024	Sosial	Donasi	IPHI Kalasan	500.000
01-11-2024	Sosial	Bisyaroh Ustadz	IPHI Kalasan	500.000
29-11-2024	Sosial	Donasi	Masyarakat Maluku	300.000
13-12-2024	Sosial	Perluasan Tanah Masjid	Masjid Mujahiddin JAP	2.000.000
02-09-2024	Sosial	Pembangunan Mushala	SD Negeri Janten	500.000
22-01-2024	Sosial	Pemberdayaan Ekonomi	Rumah Zakat	1.000.000
12-02-2024	Sosial	Khitanan Masal	Pondok Pesantren Ulul	300.000

29-02-2024	Sosial	Donasi	Gerakan Peduli	500.000
29-02-2024	Sosial	Donasi	Pantiasuhan Muhammadiyah Al Amin	1.000.000
29-02-2024	Sosial	Listrik Masjid Al-Irsyad Jan-Feb 2024	Masjid Al-Irsyad	1.000.000
01-03-2024	Sosial	Takbiran	Masjid Baitul Karim	250.000
13-03-2024	Sosial	Tarhib Ramadhan	Masjid Nurul Huda	250.000
14-03-2024	Sosial	Pembangunan Masjid	Masjid Al Maghfira	1.000.000
15-03-2024	Sosial	Takjil Ramadhan	Masjid Al-Irsyad, Masjid Karangajen	7.500.000
15-03-2024	Sosial	Setoran Dana CSR, Dana Sosial, Dakwah	Masyarakat Umum	10.000.000
15-03-2024	Sosial	Setoran Dana CSR, Dana Sosial, Dakwah	Masyarakat Umum	10.000.000

18-03-2024	Sosial	Kegiatan Ramadhan	Masjid Al Bahrawi	1.000.000
22-03-2024	Sosial	Kegiatan Ramadhan	Masjid Syuhada	1.000.000
22-03-2024	Sosial	Kegiatan Ramadhan	Masjid Al Mizan Srokarsan	500.000
26-03-2024	Sosial	Infaq	Masjid Jami' Karangajen	3.000.000
30-03-2024	Sosial	Penyaluran Infaq	Yayasan Amal Sholeh	500.000
30-03-2024	Sosial	Penyaluran Infaq	Goedang Zakat	1.000.000
30-03-2024	Sosial	Penyaluran Infaq	Laznas IZI	750.000
30-03-2024	Sosial	Penyaluran Infaq	Lazis Sembada	500.000
30-03-2024	Sosial	Bakti Sosial	Kompartemen BPRS Asbisindo	1.000.000
30-03-2024	Sosial	Kegiatan Forum Masjid	Masjid Jeruksri	510.000
30-03-2024	Sosial	Kemanusiaan Palestina	Asbisindo	5.000.003

05-04-2024	Sosial	Kegiata l'tikaf	Masjid Abu Bakar	250.000
05-04-2024	Sosial	Infaq	Yayasan Kholid Bin Walid	250.000
05-04-2024	Sosial	Takbir Keliling	Kematren Mergangsan	250.000
05-04-2024	Sosial	Infaq Ramadhan	TK ABA Karanganyar	250.000
05-04-2024	Sosial	Semarak Ramadhan	SD Juara	500.000
05-04-2024	Sosial	Parenting Akbar	Muad Bin Jabbal	250.000
05-04-2024	Sosial	Infaq	LazizMu Umbulharjo	250.000
18-04-2024	Sosial	Infaq	Masjid Al Bahrawi	1.000.000
25-04-2024	Sosial	Wakaf Uang Karyawan	Dompot Dhuafa	8.318.795
30-04-2024	Sosial	Infaq Listrik Masjid Al Irsyad	Masjid Al-Irsyad	1.000.000
17-05-2024	Sosial	Bencana Alam Sumbar	Asbisindo	2.000.002

17-05-2024	Sosial	Gema Takbir	TPQ YKUI Bahrawi	250.000
30-05-2024	Sosial	Infaq Listrik Masjid Al Irsyad	Masjid Al-Irsyad	1.000.000
31-05-2024	Sosial	Bakti Sosial	Komunitas Becak	200.000
03-06-2024	Sosial	Donatur	Kelurahan Danurejan	500.000
14-06-2024	Sosial	Bakti Sosial	Masyarakat Umum	1.500.000
26-06-2024	Sosial	Mariposa IMM	Fakultas Hukum UMY	200.000
26-06-2024	Sosial	Keberangkatn Umrah	Mushala An Nur	1.000.000
28-06-2024	Sosial	Pendidikan Siswa	Dhuafa Hilmia	500.000
18-03-2024	Sosial	Donatur	Yayasan Tuna Netra	1.000.000
02-04-2024	Sosial	Mobil Dakwah	Masjid Indo	1.000.000
04-04-2024	Sosial	Bingkisan Lebaran	Yatim Dhuafa	500.000

05-04-2024	Sosial	Program Ramadhan	Rumah Zakat	500.000
18-03-2024	Sosial	Yatim Dhuafa	RA MBJ	500.000
18-03-2024	Sosial	Alat Drumband	Masjid Al Jannah	500.000
18-03-2024	Sosial	Kegiatan Ramadhan	ISC KP	500.000
21-03-2024	Sosial	Infaq Shadaqah	Agen Sedekah	500.000
22-03-2024	Sosial	Infaq Shadaqah	Yayasan Amal Sholeh	500.000
30-03-2024	Sosial	Yatim Dhuafa	Mutiara Insani	500.000
01-04-2024	Sosial	Kegiatan Ramadhan	TPA Nurul Haq	500.000
18-04-2024	Sosial	Wakaf Tanah	MBS Pleret	500.000
26-04-2024	Sosial	Jum'at Berkah	Masjid BGN	726.000
22-05-2024	Sosial	Infaq	Pondok Pesantren Gua Hira	300.000
14-06-2024	Sosial	Qurban	Masyarakat Umum	3.000.000

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR SYARIAH Barokah Dana Sejahtera Tahun 2024 ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas kinerja manajemen serta seluruh jajaran Sumber Daya Insani PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance (GCG)*.

